PENCABULAN DISERTAI PEMBUNUHAN DALAM KACAMATA HAK ASASI MANUSIA

Yunsi Wuarlela¹, Rizka sartika², Muhammad Hamzah³, Andi Suhartini⁴

ABSTRACT

Fornication is a violation of the human rights of the child and there is no reason that can justify it from a moral, ethical and religious perspective, especially the criminal act of sexual immorality committed by a pedophile. Pedophilia is a form of abuse of a minor or a teenager who uses a child as sexual stimulation. Pedophilia is classified as a crime against children because it produces side effects for the victim. The effects of sexual violence on children include: depression, post-traumatic stress disorder and anxiety. Therefore, with cases of sexual deviance such as pedophilia, it is necessary to have special protection for children who are sexually exploited, which is the responsibility of the government and society. As regulated in Article 66 section (2) of Law No. 23/2002. This action is intended to create the best life for children who are expected to be the nation's potential successors, strong, nationalism imbued with noble morals and Pancasila values, and have a strong will to maintain the unity and unity of the nation and the State.

Keywords: *Forcication, Pedophilia, a teenager, Human rights, Sexual violence*

Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia, keberlangsungan sebuah bangsa dan keberlangsungan sebuah negara karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada serta menjadi amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa dijaga dan dilindungi oleh sebab karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang dijunjung tinggi keberadaannya.

Perbuatan cabul adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan. Perbuatan cabul merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan diluar perkawinan. Cabul menurut Adami Chazawi adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan oleh orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Yunsi Wuarlela, yunsiwuarlela@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Rizka Sartika, rizkasartika26.06@gmail.com

³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Muhammad Hamsah, hamsahmuhammad05@gmail.com

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir, Andi Suhartini, anditini439i@gmail.com

kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁵

Pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁶ sebagaimana telah 2 kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak⁷, menyatakan sanksi bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Akibat hukum dari tindak pidana pencabulan dalam bentuk hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipenjarakan paling singkat 3 (tiga) tahun. karena korbannya adalah anak di bawah umur.

Salah satu kejahatan yang mengalami perkembangan adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan cara yang konvensional, namun seiring perkembangan kehidupan, manusia melakukan tindak pidana pembunuhan dengan beberapa cara. Hal tersebut semakin menunjukkan penurunan moralitas manusia dan semakin tidak menghargai hak manusia untuk hidup, karena pada hakekatnya tidak ada manusia yang berhak merampas hak hidup manusia lainnya. Mahfud MD seperti dikutip dari makalah Suwandi, hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara (Suwandi, 2009: 39).

Hak yang paling mendasar dalam masalah Hak Asasi Manusia adalah Hak Untuk Hidup. Hak Asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita. Penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi

⁵ Sulisrudatin, N.(2016). *Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara –Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 6. No.2.(2016).

⁶ Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁷ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

bangsa dan nega di masa yang akan datang.⁸

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian.⁹

Analisis Dan Pembahasan

A. Tinjauan komposional terhadap kejahatan pencabulan dan pembunuhan anak di bawah umur.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur terdapat beberapa pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296.

- Pasal 289 KUHP menentukan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pengaturan

⁸ Sardol, S.(2013). Human Rights Arrangement on Indonesian Law.*Rechtsidee, Vol 1 No 1,(2014)*

⁹ Syahrudin Nawi. 2017. Metode Penelitian Hukum Normative Versus Empiris Edisi 5. Makassar : PT. Umitoha hal. 7.

lebih khusus mengenai perlindungan hukum terhadap anak tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. Pembentukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan yuridis dan bagian kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan bernegara. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak. Draf pertama Rancangan Undang-Undang Perlindungan Anak ini tersusun pada tahun 1998 dalam kondisi politik dan keamanan Indonesia yang kurang menguntungkan serta krisis ekonomi yang begitu mengkhawatirkan.¹⁰ Pasal 293 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

- Pasal 293 ayat (2) KUHP: “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu”.Pasal 293 ayat (3) KUHP Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74, ditentukan buat satu-satu pengaduan ini ialah 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) bulan. Pasal 294 KUHP menentukan: Pasal 294 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- Pasal 294 ayat (2) KUHP Diancam dengan pidana yang sama: 1.Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya. 2.Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan Negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

¹⁰ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: KPAI, hlm. 1.

- Pasal 295 KHUP menentukan Diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain. 2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- Pasal 296 KHUP menentukan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu.”¹¹

Adapun pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur yang dapat juga disebut dengan *child molester*, dapat digolongkan ke dalam lima kategori yaitu:

- a. *Immature*: para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
- b. *Frustrated*: para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
- c. *Sociopathic*: para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
- d. *Pathological*: para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature senile deterioration*).
- e. *Miscellaneous*: yang tidak termasuk semua kategori tersebut di atas.¹²

¹¹Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹²Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 46

Terdapat klasifikasi pencabulan yang terbagi melalui beberapa macam jenis pencabulan yang antara lain sebagai berikut:

- a.) Sadistic rape, Pencabulan sadis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
- b.) Anaea rape, Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
- c.) Dononation rape, Yakni suatu pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- d.) Seduktive rape, Suatu pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.
- e.) Victim precipitated rape, Yakni pencabulan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya. Exploitationrape, Pencabulan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-lakidengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang dicabuli suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihaknya yang berwajib.¹³

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan

¹³ Koesparmono Irsan, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007).

menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut Hukum Pidana Positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari si pelaku, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembeda, atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pelaku.¹⁴

Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Dengan Tindak Pidana Lain. Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi : “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.”¹⁵

Pembunuhan dilakukan terhadap anak dibawah umur, dan pembunuhan dilakukan dengan tidak sengaja karena untuk membela diri. Berkaitan dengan hal pertama, korban adalah “anak dibawah umur” maka akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan undang-undang tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa seperti yang anda sampaikan, termasuk kedalam kekerasan fisik terhadap anak, pelaku kekerasan fisik terhadap anak dapat diancam pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana disebutkan. Pada dasarnya, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak (Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)¹⁶ yang ancaman

¹⁴ P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012, halaman 1

¹⁵ KUHP tentang Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Dengan Tindak Pidana Lain.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

sanksinya lebih lanjut diatur dalam Pasal 80 undang-undang yang sama dengan bunyi sebagai berikut: (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya. Maka dalam hal ini dapat dipergunakan Pasal 76C jo. Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, maka kita dapat mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hal ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."¹⁷ Namun berdasarkan informasi yang Saudara sampaikan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja dan sebagai upaya pembelaan diri maka dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan "pembelaan dalam keadaan darurat". Perbuatan pembelaan darurat atau pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut: (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Namun, dikarenakan informasi yang Saudara sampaikan belum jelas, apakah anak tersebut meninggal saat perkelahian atau dengan menggunakan alat maka terkait dengan hal ini, perlu diperhatikan unsur-unsur sebuah tindakan pembunuhan dapat dianggap sebagai pembelaan darurat. Menurut R. Sugandi (1980), sebuah tindakan dapat digolongkan sebagai pembelaan darurat jika memenuhi tiga syarat berikut:

¹⁷ KUHP berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

1. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan lain yang lebih baik.
2. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan, dan harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan “melawan hak”, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang akan mengambil barang orang lain, atau pencuri yang ketahuan ketika mengambil barang orang lain kemudian menyerang pemilik barang itu dengan senjata tajam. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh melawan untuk mempertahankan diri dan barang yang dicuri itu sebab si pencuri telah menyerang dengan melawan hak. Prinsip hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai siapa pelaku tindak pidana yang sesungguhnya yang seharusnya dituntut dan didakwa. Seseorang belum dapat dikatakan bersalah telah membunuh sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah melakukan tindak pidana, tapi baru dijadikan sebagai tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHP). Pada akhirnya mekanisme pembuktian di pengadilan lah yang akan membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak. Maka, Hakimlah yang harus menguji dan memutuskan, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Kepolisian apakah kasus tersebut memenuhi alasan untuk dapat dipidana atau hanya mendapatkan keringanan pidana. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dasar hukum : - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915 Tentang Peraturan Hukum Pidana. - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana¹⁸ atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana – KUHP. - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak¹⁹ sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

¹⁸Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak²⁰, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa anak meskipun melakukan tindak pidana dalam hal ini melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan, anak tetap mendapatkan perlindungan khusus atas perbuatannya menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkannya tersebut.

²⁰Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan²¹. Pencabulan adalah perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan seksual termasuk ke dalam ancaman untuk perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut Pasal 69 a perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kejahatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi sosial
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Tindak pidana seperti pembunuhan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/tubuh orang lain yang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami keputusasaan akan keselamatan jiwanya. Akhir-akhir ini banyak peristiwa menarik perhatian masyarakat, yaitu semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari hidup yang telah dibunuhnya. Pada kebanyakan masyarakat, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran lainnya. Seriusitas tindak kejahatan ini umumnya dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan.²²

Penutup

Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur terdapat beberapa pasal yang mengatur yaitu pasal : 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296. Tindak pidana seperti pembunuhan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/ tubuh orang lain yang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bahayanya bagi kelangsungan

²¹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²² Eko Hariyanto, Memahami Pembunuhan, Kompas, Jakarta, 2014, halaman 10.

hidup masyarakat yang akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami keputusasaan akan keselamatan jiwanya. Akhir-akhir ini banyak peristiwa menarik perhatian masyarakat, yaitu semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari hidup orang yang telah dibunuhnya.

Referensi

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), (Bandung: Refika Aditama, 2001), hal. 46

Eko Hariyanto, Memahami Pembunuhan, Kompas, Jakarta, 2014, halaman 10.

Koesparmono Irsan, Hukum Perlindungan Anak, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Perlindungan Anak berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jakarta: KPAI, hlm. 1.

KUHP tentang Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Dengan Tindak Pidana Lain.

KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

KUHP, yang mengatur tentang tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.

P.A.F, Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Jakarta, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012, halaman 1

Pasal 82 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sulistrudatin, N.(2016). *Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara –Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Volume 6. No.2.(2016).

Undang – Undang No. 35 Tahun 2014 dan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Sardol, S.(2013). Human Rights Arrangement on Indonesian Law. *Rechtsidee, Vol 1 No 1,(2014)*

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.